

LKjIP

2020



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

• Profesional • Responsif • Integritas • Mandiri • Akuntabel



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 7 Tangerang

www.pn-tangerang.go.id

2020



KATA PENGANTAR

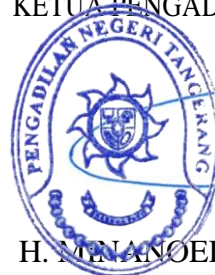
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2020. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang terdiri 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Tangerang.

Tangerang, 22 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



H. MINANJOER RACHMAN, SH.,MH.



RINGKASAN EKSEKUTIF

S elama tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada 19 (sembilan belas) indikatornya.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020 semuanya dapat dilaksanakan dengan baik (*dilihat dari rata-rata capaian 100% atau lebih*), yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
2. Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel;
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal;
4. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif;
5. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebesar 104.45%. Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2020 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2020 disajikan dalam matriks berikut ini:

Tabel 1. Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Perdata			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana Biasa	77.51%	80.34%	103.65%
		2. Pidana Anak	100%	82.08%	82.08%
		3. Perdata	79.66%	73.74%	92.56%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Banding : -Pidana Biasa	96.68%	96.37%	99.67%
		-Pidana Anak	100%	96.36%	96.36%
		- Perdata	91.33%	94.69%	103.67%
		2. Kasasi : - Pidana Biasa	97.37%	98.30%	100.95%
		- Pidana Anak	100%	100%	100%
		- Perdata	94.32%	99.12%	105.08%
3. PK : - Pidana Biasa	99.65%	99.84%	100.19%		
- Pidana Anak	100%	100%	100%		
- Perdata	97.00%	99.70%	102.78%		

	d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	3.84%	7.14%	185.9%
	e.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%	89.67%	105.12%
	f.	Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 1					106.43%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu		
		-	Pidana Biasa	100%	100%
		-	Pidana Anak	100%	100%
		-	Perdata	96.08%	108.6%
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6.88%	5.87%	85.31%
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	42.94%	38.69%	90.10%
		-	Pidana Biasa	100%	66.66%
		-	Pidana Anak	54.83%	66.66%
		-	Perdata	37.89%	69.10%
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil	Nihil	Nihil
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 2					88.53%
3.	Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		
		b.	Persentase perkar yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbankum)		
			100%	100%	100%
			Nihil	Nihil	Nihil
			100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 3					100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti		
			10.62%	15.91%	149.8%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 4					149.8%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a.	Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial		
		b.	Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis		
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran 5					100%
6.	Meningkatnya hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a.	Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti		
			100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 6					100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a.	Nilai IKPA DIPA 01		
		b.	Nilai IKPA DIPA 03		
			100%	92.15%	92.15%
			100%	98.40%	98.40%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 7					95.27%
8.	Meningkatnya pengelolaan aset		Presentase Realisasi Output Pengadaan BMN		
			100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 8					100%
Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang					105.01%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 96.06% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 90.94% untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020-2024	10
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Rencana Kinerja Tahun 2020	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan Umum	61
B. Hambatan / Masalah	62
C. Rekomendasi	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020

Lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama

Lampiran 5 Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang.

Lampiran 6. SK Tim Penyusun LKjIP tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pengukuran Kinerja dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2020	ii
Tabel 2.	Persentase perbandingan sisa perkara yang diselesaikan	4
Tabel 3.	Persentase perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu	4
Tabel 4	Persentase perbandingan penurunan sisa perkara	4
Tabel 5	Persentase perbandingan perkara yang tidak megajukan upaya hukum	5
Tabel 6	Persentase perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi ..	5
Tabel 7	Persentase perbandingan Index Responden Pencari Keadilan yang Puas pada Layanan Peradilan	5
Tabel 8	Persentase perbandingan Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	6
Tabel 9	Persentase perbandingan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	6
Tabel 10	Potensi dan permasalahan.....	8
Tabel 11	Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 12	Matriks Renstra Pengadilan Negeri Tangerang 2020-2024.....	17
Tabel 13	Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020.....	20
Tabel 14	Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang	24
Tabel 15	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang	25
Tabel 16	Hasil pengukuran capaian kinerja	27
Tabel 17	Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	29
Tabel 18	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	30
Tabel 19	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	30
Tabel 20	Persentase penurunan sisa perkara	35
Tabel 21	Sasaran meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	40
Tabel 22	Persentase Isi Putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu.....	40
Tabel 23	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah putus.....	43
Tabel 24	Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2020	49
Tabel 25	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2020	50
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2020.....	50
Tabel 27	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2019.....	51
Tabel 28	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2020	52

Tabel 29	Realisasi Anggaran per Program Tahun 2020.....	53
Tabel 30	Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2020.....	54
Tabel 31	Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020.....	54
Tabel 32	Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 terhadap RKT dan PKT.....	58



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 31



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang	2
Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Tangerang	11



BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang secara hirarki organisatoris dan administratif berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Tangerang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang menyatakan:

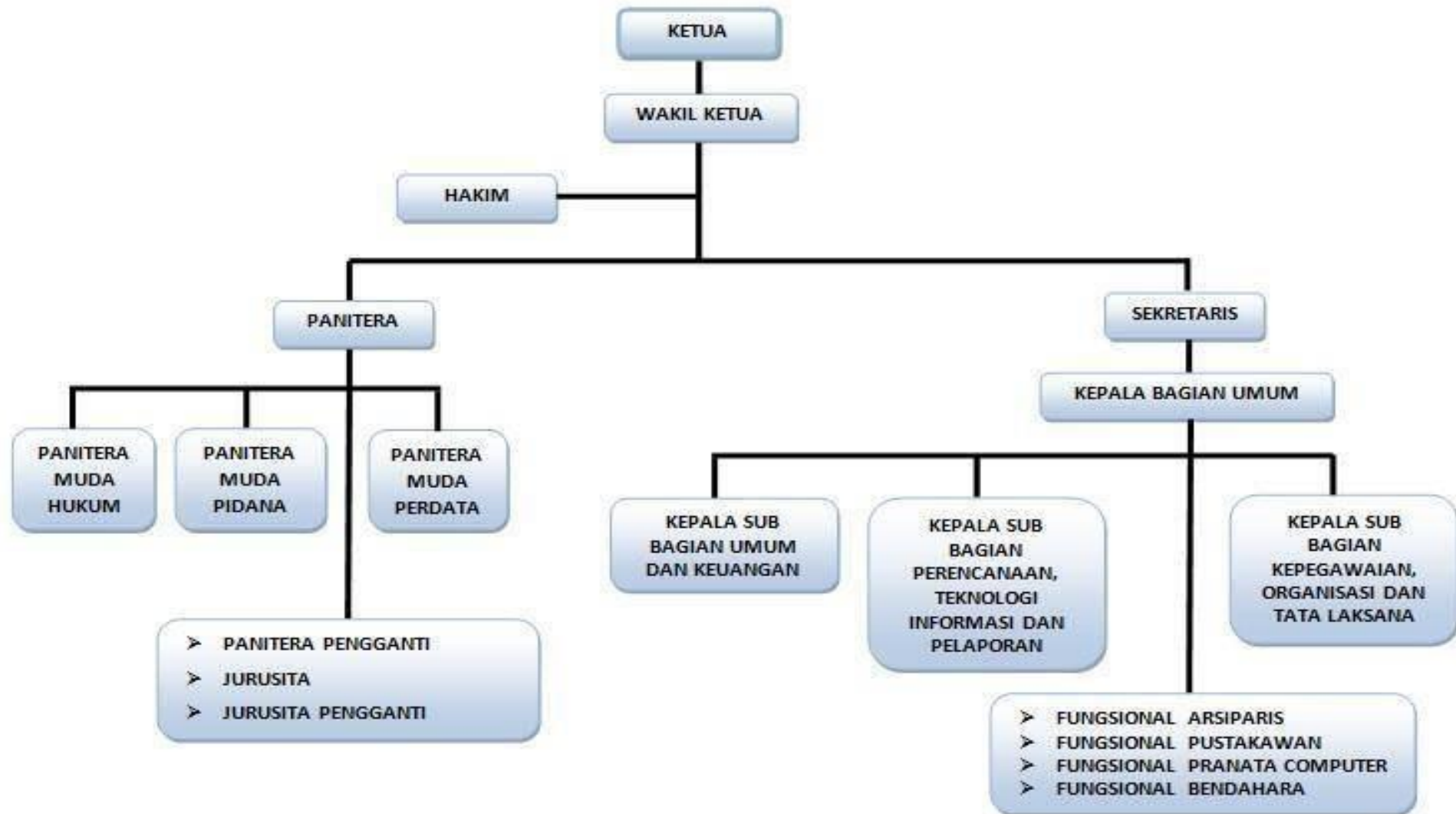
- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Negeri Tangerang memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG



Kantor Pengadilan Negeri Tangerang berlantai 6 dengan luas tanah keseluruhan $\pm 4.000\text{M}^2$ dan Luas Bangunan $\pm 6.520\text{ M}^2$, + selebihnya untuk halaman Parkir. Pengadilan Negeri Tangerang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 7 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Kode Pos 15118. Pembangunan gedung belakang Pengadilan Negeri Tangerang ditangani oleh kontraktor FA. Chandra Putra yang selesai pada tahun 2015.

Berdasarkan Bezaeting periode 31 Desember 2020, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 145 (Seratus Empat Puluh Lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	23	Aktif
4.	Panitera	1	Aktif
5.	Sekretaris	1	Aktif
6.	Kepala Bagian Umum	1	Aktif
7.	Panitera Muda	3	Aktif
8.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
9.	Panitera Pengganti	40	Aktif
10.	Jurusita	3	Aktif
11.	Jurusita Pengganti	23	Aktif
12.	Staf Pelaksana	19	Aktif
13.	Tenaga Honorer	26	Aktif
JUMLAH		145	Seratus Empat Puluh Lima Orang

Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas sudah sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya berjumlah ± 120 (seratus dua puluh) orang untuk Pengadilan Negeri Klas IA Khusus. Akan tetapi sejauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Tingkat Pertama terlaksana dengan baik.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Tangerang masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Tangerang.

1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Tabel 2. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Realisasi**	Target	Capaian
2020	Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
	Pidana Anak	10	10	100%	100%	100%
	Perdata	656	656	100%	100%	100%
2019	Pidana Biasa	704	704	100%	100%	100%
	Pidana Anak	20	20	100%	100%	100%
	Perdata	682	682	100%	100%	100%
2018	Pidana	775	775	100%	100%	100%
	Pidana Anak	8	8	100%	100%	100%
	Perdata	609	609	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Tabel 3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Realisasi**	Target	Capaian
2020	Pidana Biasa	2657	3307	80.34%	77.51%	103.65%
	Pidana Anak	55	67	82.08%	100%	82.08%
	Perdata	2053	2784	73.74%	79.66%	92.56%
2019	Pidana Biasa	2592	3344	77.51%	73.67	105.21%
	Pidana Anak	54	78	69.23%	100%	69.23%
	Perdata	2503	3142	79.66%	76.43	104.22%
2018	Pidana Biasa	2596	2749	73.67%	76.78%	95.95%
	Pidana Anaka	84	102	82.35%	100%	82.35%
	Perdata	2212	2894	76.43%	76.84%	99.47%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Tabel 5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Realisasi**	Target	Capaian
2020	Banding	4638	4765	97.33%	94.05%	103.48%
	Kasasi	4702	4765	98.67%	96.01%	102.92%
	PK	4755	4765	99.79%	98.35%	101.46%
2019	Banding	4792	5095	94.05%	95.63%	98.34%
	Kasasi	4885	5095	96.01%	96.59%	99.25%
	PK	5011	5095	98.35%	98.48%	99.86%
2018	Banding	4598	4808	95.63%	94.70%	100.98%
	Kasasi	4644	4808	96.59%	97.26%	99.31%
	PK	4734	4808	98.46%	99.42%	99.04%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Tabel 6. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara Diversi	Jumlah perkara diversi yang diselesaikan	Jumlah perkara pidana anak yang ada	Realisasi	Target	Capaian
2020	Pidana anak	2	28	7.14%	3.84%	185.93%
2019	Pidana anak	3	78	3.84%	9.80%	39.18%
2018	Pidana anak	10	102	9.80%	2.70%	363.10%

Tabel 7. Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang Puas pada Layanan Peradilan

Tahun Pelaksanaan Index Responden	Realisasi**	Target	Capaian
2020	89.67%	85.30%	105.12%
2019	85.30%	78.94%	108.05%
2018	78.94%	65.94%	119.71%

2. Aspek Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan Teknologi Informasi.

Tabel 8. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Tahun		Jumlah Putusan dalam Tahun Berjalan	Jumlah Isi Putusan yang diterima oleh Pihak	Target	Realisasi	Capaian
2020	Pidana Biasa	3279	3279	100%	100%	100%
	Pidana Anak	55	55	100%	100%	100%
	Perdata	1246	1246	92.08%	100%	108.6%
2019	Pidana Biasa	2592	2592	96.03%	100%	104.13%
	Pidana Anak	54	54	100%	100%	100%
	Perdata	1238	1140	92.31%	92.08%	99.75%
2018	Pidana Biasa	2596	2493	75.26%	96.03%	127.60%
	Pidana Anak	84	84	100%	100%	100%
	Perdata	2212	2042	85.12%	92.31%	108.45%

** Perbandingan jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan tujuan memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

Tabel 9. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Perkara	Jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Realisasi**	Target	Capaian
2020	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2019	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2018	Tipikor	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.

3. Aspek Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh

kemudahan akses pengadilan maka Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan pelaksanaan berperkara secara cuma-cuma/prodeo kepada masyarakat miskin terpinggirkan dan pemberian pelayanan terpadu guna membantu penguatan identitas hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT /RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Aspek Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan peradilan, merupakan salah satu aspek dari penegakan hukum. Masih banyak aspek lainnya yang terkandung dalam penegakan hukum. Secara implisit pelaksanaan putusan peradilan, menyangkut aspek perdata, pidana, tata negara, lingkungan, dan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering diwarnai berbagai kendala, serta diragukan ada yang bertentangan dengan keadilan, dan supremasi hukum serta adanya kekurangan dalam kelengkapan administrasi peradilan.

Tabel.10. Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
1. Aspek terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; • Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Tangerang; • Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat sertifikasi dalam penanganan perkara; • PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; • Website Pengadilan Negeri Tangerang sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan sisa perkara Pidana dan Perdata yang tidak bisa diprediksi setiap tahun; • Informasi Salinan putusan di Pengadilan Negeri Tangerang yang bisa dilihat oleh publik di direktori putusan, sedangkan diaplikasi SIPP belum dapat diakses oleh publik.
2. Aspek meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pada sistem aplikasi SIPP yakni sistem belum bisa melakukan validasi data secara cepat dalam waktu satu hari.
3. Aspek Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan • Anggaran untuk Layanan Hukum yang masih sangat terbatas.
4. Aspek Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian administrasi peradilan yang masih belum berjalan dengan baik. • Pengawasan terhadap eksekusi hasil putusan yang masih lemah.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

➤ Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategicissued*) yang sedang dihadapi organisasi.

➤ Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➤ Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

➤ Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)2020-2024.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Tangerang akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

1. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tangerang. Visi Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: *“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang”*.

Artinya:

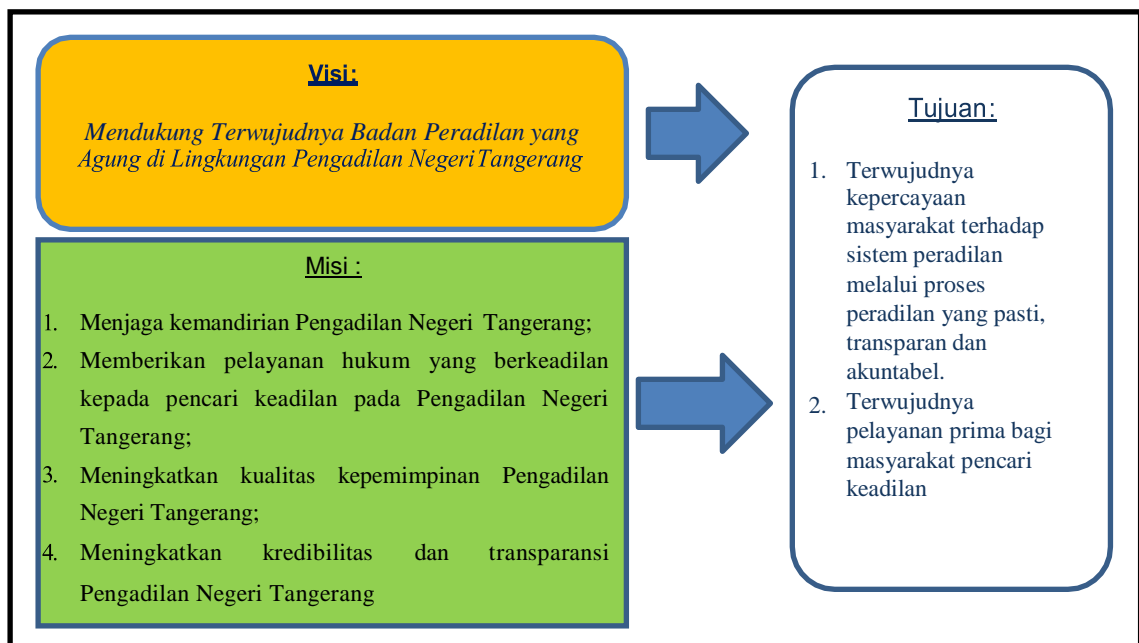
1. Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Tangerang;
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Tangerang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tangerang, adalah sebagai berikut:

2. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Tangerang



A. Tujuan Utama dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tangerang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana;
- d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;
- e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;
- f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu; dan

- d) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (acces to justice)

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan; dan
 c) Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi)

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Tangerang setiap tahun anggaran melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis sebagai dasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan Rencana Kinerja Tahun Anggaran berikutnya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/39/SK/KP.10.10/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang

Indikator Kinerja Utama ini dijadikan acuan dalam mengukur Capaian Kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 11. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan	Perbandingan Sisa Perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi dengan Jumlah Perkara Pidana Anak.

			e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	Indeks kepuasan pencari keadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan perkara yang dilakukan mediasi.
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Perkara banding, kasasi dan PK yang dimohonkan
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus.
3	Peningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.
4	Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan Putusan Perkara yang sudah BHT.

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tangerang, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

1. Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*)
Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :
 - a) Penyelesaian Pos Bantuan Hukum
 - b) Penyelesaian Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
 - c) Penyelesaian Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo)

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase penyelesaian sisa perkara 1) Pidana Biasa 2) Pidana Anak 3) Perdata
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Biasa 2) Pidana Anak 3) Perdata
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

		Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti. (dieksekusi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial
		Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA Dipa 01
		Nilai IKPA Dipa 03

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase Realisasi Output pengadaan BMN

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

LKJIP PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2020

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi										
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
				e) Index Responden Pencari keadilan Yang puas terhadap layanan Peradilan	85.30	85.30	85.30	85.30	85.30	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1.000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000		
			f) Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100	100	100	100	100													
				a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98.69	104.3	104.34	104.3	104.3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1.000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000		
			b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6.88	5.7	5.7	5.7	5.8							1.000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000
			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	79.62	38.29	38.291	38.29	38.29							1.000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Nihil	Nihil	NIHIL	NIHIL	NIHIL							2	Unit	25.000.000	265.000.000	248.500.000	376.750.000	285.600.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	3	PKR	2.760.000	2.760.000	2.580.000	3.156.000	3.980.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		100	100	100	100	100	336				OJ	33.600.000	33.600.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	800	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000	
				Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62	15.91	16.16	16.87	17.48											
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA 01	98	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis	26	Org	22	30	30	30	30	
				Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek teknis	9		15	15	15	15		
				Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan	1	LHP Daerah	1	1	2	2	2
		Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA Dipa 01	100	94	95	96	97	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah layanan perkantoran	1	layanan	98.10	99.00	99.20	99.70	100.00		
			Nilai IKPA Dipa 03	100	94	95	96	97	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA				97.35	98.77	99.30	99.65	100.00		
		Meningkatnya pengelolaan aset	Persentase realisasi output pengadaan BMN	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah BMN			25.000.000	265.000.000	248.500.000	376.750.000	285.600.000		

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 27 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak yang diselesaikan tepat waktu 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : Isi putusan = salinan putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Gol Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bankum} \times 100\%}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	522.400.000
		Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu.	85.72%					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.	96,13%					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3.84%					
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%					
		Presentase pelayanan zero complain di PTSP	100%					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	98.69%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	522.400.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6.88%					
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	79.62%					
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	Nihil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang mendukung peradilan umum	2 Unit	25.000.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Di Wilayah Banten	3 PKR	2.760.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Nihil					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10.62%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding yang Tepat Waktu	1000 PKR	522.400.000

5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Presentase Tenaga Teknis / pegawai yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat/bimtek	26 org	22 org
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan	1 Lap	1 Laporan
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA DIPA 01 dan 03	100%	Program dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Perkantoran	100%	98.10
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Presentase Realisasi output pengadaan BMN	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	100%	25.000.000

D. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang 2020 – 2024 (Dokumen terpisah), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. W29.U4/39/SK/KP.10.10/12/2019 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang (Dokumen terpisah).

Tabel 15. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	100% 100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	77.51% 100% 79.66%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	94.05% 96.01% 98.35%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3.84%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%
		f. Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	98.69%
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6.88%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	79.62%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Nihil
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	NIHIL
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase Tenaga Teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA Dipa 01	100%
		b. Nilai IKPA Dipa 03	100%
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	a. Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%

Kegiatan :

Anggaran :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 20.320.661.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 25.000.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 558.760.000,- |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar 104.45%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Banding yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa	100 %	100 %	100 %
		2. Pidana Anak	100 %	100 %	100 %
		3. Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana Biasa	77.51%	80.34%	103.65%
2. Pidana Anak	100%	82.08%	82.08%		
3. Perdata	79.66%	73.74%	92.56%		
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
1. Banding	94.05%	97.33%	103.48%		
2. Kasasi	95.87%	98.67%	102.92%		
3. PK	98.35%	99.79%	101.46%		
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		3.84%	7.14%	185.93%	
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		85.30%	89.67%	105.12%	
		f. Presentase pelayanan zero complain di PTSP	100%	100%	100%
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara Banding 106.43 %</i>					

2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu			
		a. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		b. Pidana Anak	100%	100%	100%
		c. Perdata	96.08%	100%	108.6%
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6.88%	5.87%	85.31%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	a. Pidana Biasa	42.94%	38.69%	90.10%	
	b. Pidana Anak	100%	66.66%	66.66%	
	c. Perdata	54.83%	37.89%	69.10%	
	d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 88.53 %</i>					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %
<i>Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (access to justice) 100%</i>					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62%	15.91%	149.8%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Kepatuhan 149.8%</i>					
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		2. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100%</i>					
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja Aparatur pengadilan	1. Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 100%</i>					
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA Dipa 01	100%	92.15%	92.15%
		2. Nilai IKPA Dipa 03	100%	98.4%	98.4%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan 95.27%</i>					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	1. Presentase Realisasi output pengadaan BMN	100%	100%	100%

Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan
100%

**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TAHUN 2019 SEBESAR 105.01 %**

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja		Capaian Th.		
		2020	2019	2018
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
	2. Pidana Anak	100%	100%	100%
	2. Perdata	100%	100%	100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Pidana Biasa	103.65%	95.95%	96.23%
	2. Pidana Anak	96.49%	100%	100%
	2. Perdata	92.56%	99.47%	99.35%
3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	1. Banding	85.94%	100.98%	95.15%
	2. Kasasi	85.05%	99.31%	86.75%
	3. PK	72.44%	99.04%	103.58%
4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		185.93%	363.10%	54%
5. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		105.12%	119.71%	92.42%

6. Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP		100%	-	-
Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.		102.26%	90.75%	122.65%

Peningkatan ini terutama pada indikator ke-4 yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
- Indikator kinerja ini untuk menggambarkan sisa perkara tahun sebelumnya (tahun 2019) yg belum putus dan harus diselesaikan / diputus ditahun 2020.

Tabel 18. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)				
			2019	2018	2017	2016	2015
Persentase sisa perkara yang diselesaikan							
1. Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat di simpulkan :

- Untuk perkara Pidana Biasa tahun 2018 sisa 704 perkara, tahun 2017 sisa 775 perkara, tahun 2016 sisa 612 perkara, tahun 2015 sisa 507 perkara, dan tahun 2019 sisa 778 perkara, semua bisa di selesaikan/diputus sehingga mencapai target 100% ;
- Untuk perkara Pidana anak tahun 2018 sisa 8 perkara, pada tahun 2019 sisa 20 perkara dan tahun 2020 ada sisa 10 perkara yang harus diselesaikan.

No.	Jenis Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pidana Biasa	507	612	775	704	778

No.	Jenis Perkara	2017	2018	2019
1.	Pidana Anak	8	20	10

- Untuk perkara Perdata tahun 2018 sisa 682 perkara, tahun 2017 sisa 609 perkara, tahun 2016 sisa 525 perkara, tahun 2015 sisa 440 perkara, dan tahun 2019 sisa 656 perkara semua perkara tersebut diselesaikan/diputus sehingga persentase capaiannya 100% ;

No.	Jenis Perkara	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perdata	440	525	609	682	656

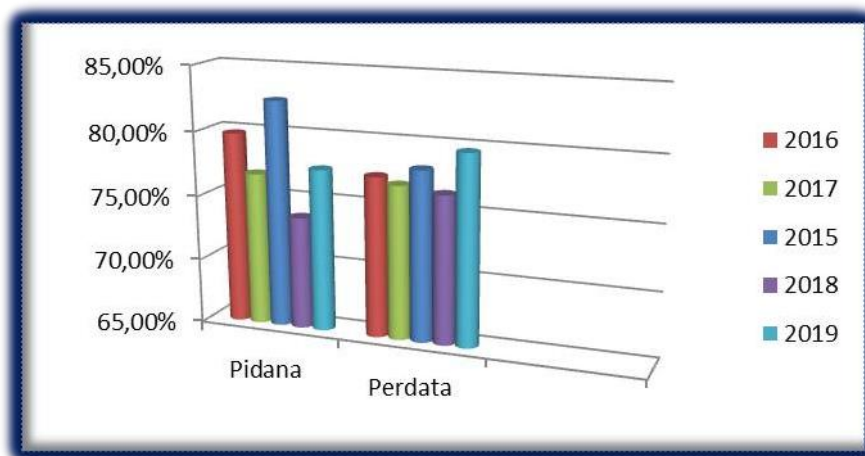
Indikator kinerja ke-2 :Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Perbandingan antara perkara yang diselesaikan (diputus dan iminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan jumlah perkara yang ada
- Indikator kinerja ini untuk menggambarkan produktivitas proses penyelesaian perkara di tahun berjalan (2020) atau untuk mengukur waktu dalam penyelesaian perkara

Tabel 19. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)				
			2020	2019	2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu							
1. Pidana Biasa	77.51%	80.34%	103.65%	105.21%	95.95%	96.23%	96.73%
2. Perdata	79.66%	73.74%	92.56%	104.22%	99.47%	99.35%	98.99%

Grafik 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



Dari table dan grafik diatas dapat di simpulkan :

1) PIDANA BIASA

Pada tahun 2020 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar 103.65%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang diselesaikan sebesar 80.34% dengan target yang ditetapkan sebesar 77.51%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 80.34% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah putus tahun 2019 sebesar 2657 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2019 sebesar 3307 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 77.51%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2020, realisasi penyelesaian perkara 80.34%. Artinya realisasi penyelesaian mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 2.83%. Hal ini karena jumlah perkara masuk tahun 2019 (3344 perkara) lebih banyak dari tahun 2020 (3307 perkara), sehingga realisasi penyelesaian perkara 80.34%.

Tabel Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2019)			778
	Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	Januari	207	262	723
2.	Februari	245	339	629
3.	Maret	230	213	646
4.	April	225	301	570
5.	Mei	221	178	613
6.	Juni	213	248	578
7.	Juli	204	233	549
8.	Agustus	193	174	568
9.	September	175	222	521
10.	Oktober	173	147	547
11.	November	225	178	594
12.	Desember	218	162	650
JUMLAH		2529	2657	7188

Perbandingan Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sebagai berikut:

No.	Tahun	Masuk*	Putus	%
1	2016	2979	2377	79.79
2	2017	3174	2437	76.78
3	2018	3524	2596	73.67
4	2019	3344	2592	77.51
5	2020	3307	2657	80.34

*perkara masuk ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase penyelesaian perkara mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2016 dan 2019 mengalami sedikit kenaikan yang disebabkan jumlah perkara yang mengalami penurunan dan mengalami persentase penurunan kembali terjadi pada tahun 2017 s.d 2018. Hal ini dikarenakan perbedaan jumlah Perkara pidana yang masuk pada tahun 2016 s.d 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada tahun 2019 sebanyak 3344 perkara dan diselesaikan sebanyak 2592 perkara (77.51%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 3307 perkara dan diselesaikan sebanyak 2657 perkara (80.34%) berarti adanya kenaikan penyelesaian perkara pidana sebesar 2.83% dari tahun 2019.

Namun persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 telah ditargetkan 77.51% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 80.34%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2020 untuk penyelesaian perkara Pidana telah tercapai dengan maksimal.

Perbandingan Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tabel Keadaan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020

No	Bulan	Sisa Tahun Sebelumnya (2019)		Sisa Akhir
		Masuk	Putus	
1.	Januari	3	0	3
2.	Februari	1	4	0
3.	Maret	4	1	3
4.	April	6	5	4
5.	Mei	5	8	1
6.	Juni	3	3	1
7.	Juli	5	2	4
8.	Agustus	10	10	4
9.	September	5	4	5
10.	Oktober	4	6	3
11.	November	6	9	0
12.	Desember	5	3	2
JUMLAH		57	55	

- Untuk perkara Pidana Anak tahun 2017 sisa 8 perkara, tahun 2018 sisa 20 perkara, tahun 2019 sisa 10 perkara, dan tahun 2020 sisa 2 perkara atau semua perkara diselesaikan pada tahun berjalan.

No.	Jenis Perkara	2017	2018	2019
1.	Perdata	8	20	10

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

No.	Tahun	Masuk*	Putus	%
1	2018	102	84	82.35
2	2019	78	54	69.23
5	2020	67	55	82.08

*perkara masuk ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, persentase penyelesaian perkara mengalami penurunan. Namun persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2020 telah ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk dengan realisasinya mencapai 82.08%. Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2020 untuk penyelesaian perkara Pidana Anak hampir mencapai hasil maksimal.

Pada tahun 2020 capaian persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan sebesar 82.08%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi

perkara pidana anak yang diselesaikan sebesar 82.08% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

2) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2020 adalah sebesar 92.56%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 73.74% dengan target yang ditetapkan sebesar 79.66%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara perdata sebesar 73.74% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai di tahun 2020 sebesar 2053 perkara dengan jumlah perkara tahun 2020 sebesar 2784 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Pada tahun 2020 capaian dan realisasi penyelesaian perkara perdata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 79.66% dan capaian terhadap target hingga 104.22% sedangkan Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 73.74% dan capaian terhadap target hingga 92.56% yang berarti terjadi penurunan realisasi perkara yang diselesaikan sebesar 11.66%.

Maka dapat dikatakan bahwa penetapan kinerja tahun 2020 untuk penyelesaian perkara Perdata belum tercapai dengan maksimal.

Tabel Keadaan Perkara Perdata
Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2019)			656
	Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	Januari	233	208	681
2.	Februari	128	114	609
3.	Maret	180	188	658
4.	April	82	162	562
5.	Mei	90	98	570
6.	Juni	177	123	626
7.	Juli	239	186	677
8.	Agustus	180	193	664
9.	September	238	230	659
10.	Oktober	165	180	682
11.	November	248	220	710
12.	Desember	168	151	727
JUMLAH		2128	2053	

*perkara perdata gugatan dan permohonan

Perbandingan Perkara yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

No.	Tahun	Masuk	Putus	%
1	2016	2317	1792	77.34
2	2017	2629	2020	76.84
3	2018	2894	2212	76.43
4	2019	3142	2503	79.66
5	2020	2784	2053	73.74

Apabila dilihat dari tabel perbandingan, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, persentase penyelesaian perkara selalu mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang masuk maupun jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penyelesaian perkara mengalami penurunan sebesar 5.92% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang diselesaikan				
1. Pidana Biasa	80.34%	77.51%	103.65%	105.21%
2. Pidana Anak	82.08%	100%	82.08%	100%
3. Perdata	73.74%	79.66%	92.56%	104.22%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel diatas sebagai berikut :

- Pada perkara pidana biasa, capaian terhadap tahun 2020 sebesar 103.65%, mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2019 yang mencapai sebesar 105.21%. Hal ini dikarenakan jumlah perkara pada tahun 2020 sebanyak 3307 perkara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara tahun 2019 sebanyak 3344 perkara.
- Pada Perkara pidana anak, capaian terhadap tahun 2020 sebesar 82.08% mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2019 yang mencapai sebesar 69.23%. hal ini dikarenakan jumlah perkara pada tahun 2020 sebanyak 67 perkara, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara tahun 2019 sebanyak 78 perkara.
- Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2020 sebesar 92.56% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 104.22%. Hal ini karena adanya penurunan jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sebanyak 2503 perkara dibandingkan tahun 2020 sebanyak 2053 perkara.

Indikator kinerja ke-4 :Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan putusan perkara
- Indikator kinerja ini untuk mengukur capaian kinerja hakim dalam memutus perkara yang diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan. Capaian sasaran perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding				
1. Pidana Biasa	96.37%	96.68%	99.67%	99.15%
2. Pidana Anak	96.36%	98.14%	96.36%	98.14%
2. Perdata	94.69%	91.33%	103.67%	97.74%

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi				
1. Pidana Biasa	98.30%	97.37%	100.95%	99.25%
2. Pidana Anak	100%	98.14%	100%	98.14%
2. Perdata	99.12%	94.32%	105.08%	99.49%

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK				
1. Pidana Biasa	99.84%	99.65%	100.19%	100%
2. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	99.70%	97.00%	102.78%	98.10%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA BIASA

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2020 adalah sebesar 99.67%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 96.37% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 96.68%

Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 96.37%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya

hukum yang diajukan sebanyak 65 perkara, baik itu upaya banding dan kasasi serta PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2020 adalah sebesar 96.37% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi kenaikan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Perkara Pidana Biasa yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut data upaya hukum perkara Pidana Biasa yang putus tahun 2019 s.d. 2018:

No.	Keterangan Perkara	2020	2019	2018
1.	Putusan yang diajukan banding	16	86	65
2.	Putusan yang tidak diajukan banding	2641	2506	2531
3.	Putusan yang diajukan kasasi	45	68	49
4.	Putusan yang tidak diajukan kasasi	2612	2524	2547
5.	Putusan yang diajukan PK	4	9	9
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	2653	2583	2587

Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi persentase perkara Pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020 adalah sebesar 96.37%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2019 adalah sebesar 96.68%, berarti terdapat penurunan persentase terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 0.31%.

Target kinerja tahun 2020 sebesar 96.68% terealisasi sebesar 99.67%, artinya bahwa kinerja mengalami sedikit penurunan dari target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang hampir memuaskan.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk peningkatan akseptabilitas putusan Hakim perkara pidana mengalami peningkatan.

2) PIDANA ANAK

Capaian persentase perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum banding, tahun 2020 adalah sebesar 96.36%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 96.36% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%. Perkara pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum PK dan kasasi adalah sebesar 100%.

Realisasi persentase perkara Pidana anak yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 96.36%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara yang telah diputus sebanyak 55 perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 2 perkara, baik itu upaya banding dan kasasi serta PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2020 adalah sebesar 96.36% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Berikut data upaya hukum perkara Pidana Anak yang putus tahun 2019 s.d. 2018:

No.	Keterangan Perkara	2020
1.	Putusan yang diajukan banding	2
2.	Putusan yang tidak diajukan banding	53
3.	Putusan yang diajukan kasasi	0
4.	Putusan yang tidak diajukan kasasi	55
5.	Putusan yang diajukan PK	0
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	55

3) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2020 adalah sebesar 102.39%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 93.52% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 91.33%

Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebesar 93.52%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara (perdata gugatan) yang telah diputus sebanyak 2053 perkara berbanding dengan putusan yang diajukan banding. Dimana jumlah upaya hukum yang diajukan sebanyak 133 perkara, baik itu upaya banding, kasasi maupun PK.

Hal ini berarti penerimaan (akseptabilitas) putusan Hakim pada tahun 2020 adalah sebesar 102.39% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan tingkat kepuasan terhadap putusan pengadilan dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

Berikut data upaya hukum perkara Perdata yang putus tahun 2018 s.d. 2020:

No.	Keterangan Perkara	2020	2019	2018
1.	Putusan yang diajukan banding	109	217	145
2.	Putusan tidak diajukan banding	1944	2286	2067
3.	Putusan yang diajukan kasasi	18	142	115
4.	Putusan tidak diajukan kasasi	2035	2361	2097
5.	Putusan yang diajukan PK	6	75	25
6.	Putusan yang tidak diajukan PK	2047	2428	2187

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020 adalah sebesar 94.69%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2019 adalah sebesar 91.33%. berarti terdapat kenaikan persentase terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 3.36%. Adapun persentase capaian kinerja

tahun 2020 sebesar 103.67%.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum mengalami kenaikan.

d) Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Pencapaian sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
d.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3.84%	7.14%	185.93%

Sasaran perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi pada tahun 2020 adalah sebesar 185.93%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi sebesar 7.14% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 3.84%. Perhitungan tersebut berdasarkan perkara Pidana Anak yang telah diselesaikan secara Diversi sebanyak 2 perkara berbanding dengan Jumlah Perkara Pidana Anak pada Tahun 2020 sebanyak 28 perkara.

Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi telah tercapai. Pada tahun 2019 capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 108.05%, sehingga capaian tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun telah mencapai target yang ditetapkan.

e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pencapaian sasaran index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
e.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85.30%	89.67%	105.12%

Sasaran Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I. Indikator kinerja ini untuk mengukur Index kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Capaian persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar 105.12%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 89.67% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 85.30%. Perhitungan tersebut berdasarkan pada hasil analisis terhadap 9 (Sembilan) ruang lingkup.

Indikator Kinerja	Capaian(%)		
	2020	2019	2018
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	105.12%	108.05%	119,71%

f) Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pencapaian sasaran pelayanan zero complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
f.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	100%

Capaian persentase pelayanan zero complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebesar 100%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi pelayanan yang diterima di PTSP tanpa complain terhadap layanan yang diterima di PTSP sebesar 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 100%.

Indikator Kinerja	Total Pelayanan yang diterima tahun 2020			
	Bagian Hukum	Bagian Perdata	Bagian Umum	Bagian Pidana
Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	6.358	9.064	12.632	6.887
Indikator Kinerja	Total Pelayanan yang diterima di PTSP tanpa complain tahun 2020			
	Bagian Hukum	Bagian Perdata	Bagian Umum	Bagian Pidana
Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	6.358	9.064	12.632	6.887



Sasaran 2 : Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Tangerang dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, Putusan diterima oleh pihak tepat waktu dan masyarakat dapat mengakses secara online putusan dalam waktu 1 (satu) hari.

Sasaran ini terdiri dari 4 (Empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 21. Sasaran meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja	Capaian Th.		
	2018	2019	2020
a. Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu	104.13%	127.60%	100%
1. Pidana biasa	100%	100%	100%
2. Pidana Anak			
3. Perdata	99.75%	108.41%	108.6%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	54.59%	195.45%	85.31%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	96.79%	96.61%	75.28%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil	Nihil	Nihil
Capaian Sasaran Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	93.76%	98.24%	93.83%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-1: Persentase Isi Putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu

- Persentase penyelesaian putusan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jumlah putusan.
- Indikator ini untuk mengukur waktu dalam penyelesaian putusan.

Tabel 22 : Persentase Isi Putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	
			2020	2019
Persentase Isi Putusan yang dapat diterima oleh para pihak Tepat Waktu				
1. Pidana Biasa	100%	100%	100%	104.13%
2. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%
3. Perdata	96.08%	100%	108.6%	99.75%

Dari tabel 22 diatas dapat disimpulkan :

1) PIDANA BIASA

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 3279 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 3279 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2019 (tahun sebelumnya), maka capaian tahun 2019 dan 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

2) **PIDANA ANAK**

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus sebanyak 55 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 55 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2019 (tahun sebelumnya), maka capaian tahun 2019 dan 2020 telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

3) **PERDATA**

Persentase isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara putus (perkara gugatan dan permohonan) sebanyak 1246 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu sebanyak 1246 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 108.6%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk isi putusan yang dapat diterima oleh para pihak tepat waktu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama cukup berjalan dengan baik.

b) **Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	6.88%	5.87%	85.31%

Sasaran persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2019 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 5.87%. Adapun perincian berkas yang terdaftar mediasi adalah sebanyak 596 perkara dan telah diselesaikan dengan hasil akta perdamaian / putusan mediasi / pencabutan sebanyak 35 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 85.31%. adapun tahun 2019 capaian kinerja sebesar 195.45%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diselesaikan melalui Mediasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	42.94% 100% 54.83%	38.69% 66.66% 37.89%	90.10% 66.66% 69.10%

Sasaran persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA BIASA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 38.69%. Perhitungan tersebut berdasarkan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK (akumulasi) telah lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan perkara yang diajukan permohonannya (akumulasi banding, kasasi dan PK).

- Banding
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 95 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 16 perkara.
- Kasasi
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 64 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 45 perkara.
- Peninjauan Kembali
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 9 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 4 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 46.03%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang cukup berjalan dengan baik.

2) PIDANA ANAK

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

adalah sebesar 66.66%. Perhitungan tersebut berdasarkan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK (akumulasi) telah lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan perkara yang diajukan permohonannya (akumulasi banding, kasasi dan PK).

- **Banding**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 3 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 2 perkara.
- **Kasasi**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 0 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 0 perkara.
- **Peninjauan Kembali**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 0 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 66.66%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Tangerang cukup berjalan dengan baik.

3) PERDATA

Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebesar 37.89%.

- **Banding**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan banding sebanyak 259 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 109 perkara.
- **Kasasi**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan kasasi sebanyak 63 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 18 perkara.
- **Peninjauan Kembali**
Adapun perincian data perkara yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 29 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap dan tepat waktu untuk dikirimkan sebanyak 6 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 69.10%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu belum dapat dicapai sepenuhnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang belum cukup berjalan dengan baik.

Indikator kinerja ke-2: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

- Perbandingan antara jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus
- Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak perkara yang menarik perhatian masyarakat

Tabel 23. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	
			2020	2019
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dari tabel 23 di atas dapat disimpulkan bahwa :

- pada tahun 2020 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah NIHIL, ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara tipikor. Jadi capaian di tahun 2020 adalah Nihil.
- pada tahun 2019 capaian untuk persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah NIHIL, ini dikarenakan Pengadilan Negeri Tangerang bukan Pengadilan Tingkat Pertama yang menangani perkara tipikor. Jadi capaian di tahun 2019 adalah Nihil.



Sasaran 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. persentase perkara yang diselesaikan di luargedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Sasaran persentase berkas perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

1. Gugatan cerai.
2. Gugatan hutang-piutang.
3. Gugatan tanah.
4. Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
5. Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon /Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon /Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon /Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

Pemohon/Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

1. Surat Pengantar dari RT /RW.
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Persentase perkara prodeo yang diajukan adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara prodeo yang diajukan sebanyak 3 perkara, setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata dan Bagian Umum Keuangan diketahui bahwa berkas yang telah lengkap, memenuhi syarat dan tepat waktu untuk diproses sebanyak 3 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara prodeo telah dapat diselesaikan sepenuhnya.

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sasaran persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2019 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan seperti sidang keliling. Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Bahwa Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu dalam wilayah Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar NIHIL. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan di Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.

c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Sasaran persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara yang telah dilaksanakan sebanyak 470 perkara, setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang telah lengkap, memenuhi syarat dan tepat waktu untuk diproses sebanyak 470 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2010 untuk perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) telah dapat diselesaikan sepenuhnya.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

4. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62%	15.91%	149.8%

Sasaran persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2019 adalah salah satu hasil Reviu Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2020 adalah sebesar 15.91%. Adapun perincian data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) atau yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 993 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa putusan perkara yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 158 perkara. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 149.8% sedangkan capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 96.55%. Dengan demikian penetapan kinerja tahun 2020 untuk perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.



Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

5. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/ bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		2. Presentase pegawai Yang lulus diklat/bimtek Non teknis	100%	100%	100%

Presentase Tenaga Teknis Yang Lulus Diklat/Bimtek Teknis Yudisial

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator kinerja presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM teknis yang lulus diklat / bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2020, diperoleh data sebagai berikut:

No.	Nama Diklat/Bimtek	Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)
1.	Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	3	3
2.	Pelatihan online SWOT	1	1
3.	Pelatihan online membangun kemitraan komunikasi pengadilan	2	2
4.	Pelatihan abstrak putusan pengadilan	1	1
5.	Pelatihan teknis fungsional perkara	1	1
6.	Pelatihan teknis fungsional gugatan sederhana bagi hakim lingkungan Peradilan Umum dan Agama	1	1
7.	Pelatihan teknis fungsional perkara terorisme bagi hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Agama	1	1

8.	Webinar seminar online Semester II	1	1
9.	Pelatihan online Kepemimpinan Organisasi Pengadilan-Memimpin Perubahan Masa Turbulensi	1	1
10.	Webinar Kepemimpinan Peradilan	1	1
11.	Pelatihan Online Monitoring Leader	1	1
12.	Pelatihan Online Manajemen Resiko	1	1
13.	Pelatihan teknis fungsional jurusita/jsp lingkungan peradilan umum seluruh indonesia	1	1
14.	Pelatihan Online Manajemen Peradilan	1	1
15.	Bahasa Inggris Gel III	1	1
16.	Pelatihan teknis fungsional Panitera Pengganti lingkungan peradilan umum seluruh Indonesia	4	4
Jumlah		22	22

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah hakim dan pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 22 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 22 orang. Presentasi pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan atau bimtek tersebut diatas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh mentor/narasumber. Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat/bimtek tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan.

Presentase Pegawai Yang Lulus Diklat/Bimtek Non Teknis

Sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan indikator kinerja presentase pegawai yang lulus diklat non teknis yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus diklat / bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2020, diperoleh data sebagai berikut:

No.	Nama Diklat/Bimtek	Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)
1.	Pelatihan online Analisa Beban Kerja Pengadilan	2	2
2.	Pelatihan online Basic Image Editing with Adobe Photoshop	3	3
3.	Pelatihan online Manajemen Peradilan	1	1
4.	Bimtek SAKIP	2	2

5.	Sertifikasi pelatihan pejabat pembuat komitmen wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat	1	1
	Jumlah	9	9

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 9 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 9 orang. Presentasi pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan atau bimtek tersebut diatas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh mentor/narasumber. Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat/bimtek tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan.



Sasaran 6 : Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

6. SASARAN MENINGKATNYA HASIL PENGAWASAN KINERJA APARATUR PENGADILAN

Pencapaian sasaran peningkatan hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Hasil pengawasan kinerja aparatur Pengadilan	Presentase temuan LHP daerah yang ditindak lanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti berbanding dengan laporan hasil pengawasan yang harus diselesaikan.

Jumlah pemeriksaan dari Hakim Pengawas Daerah tahun 2020 sebanyak 1 laporan dan sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Hal tersebut dapat dikatakan presentase temuan Laporan Hasil Pengawasan Daerah pada Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan.



Sasaran 7 : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan

7. SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pencapaian sasaran peningkatan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan	1. Nilai IKPA DIPA 01	100%	100%	100%
	Keuangan	2. Nilai IKPA DIPA 03	100%	100%	100%

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 01

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan nilai akhir per kinerja berbanding dengan jumlah bobot per kinerja.

Bulan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
Januari	54.00	65%	83.08
Februari	61.98	73%	84.90
Maret	62.09	73%	85.05
April	61.94	73%	84.85
Mei	71.51	73%	97.95
Juni	86.52	88%	98.32
Juli	98.48	100%	98.48
Agustus	98.21	100%	98.21
September	98.28	100%	98.28
Oktober	98.12	100%	98.12
November	98.11	100%	98.11
Desember	98.10	100%	98.10
Rata-Rata			93.62

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA DIPA 01	100%	93.62%	93.62%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika Nilai IKPA Dipa 01 tahun 2020 capaiannya sebesar 93.62% yang artinya hampir mencapai target yang ditetapkan.

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 03

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan ditandai dengan indikator kinerja presentase perbandingan nilai akhir per kinerja berbanding dengan jumlah bobot per kinerja.

Bulan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
Januari	49.16	60%	81.93
Februari	56.95	68%	83.76
Maret	56.61	68%	83.24
April	56.77	68%	83.48
Mei	64.80	68%	95.29
Juni	65.31	68%	96.04
Juli	65.61	68%	96.49
Agustus	65.95	68%	96.98
September	66.00	68%	97.06
Oktober	66.01	68%	97.07
November	66.10	68%	97.21
Desember	66.20	68%	97.35
Rata-Rata			92.15

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika Nilai IKPA Dipa 03 tahun 2020 capaiannya sebesar 92.15% yang artinya hampir mencapai target yang ditetapkan.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	1. Nilai IKPA DIPA 03	100%	92.15%	92.15%



Sasaran 8 : Meningkatkan Pengelolaan Aset

8. SASARAN MENINGKATNYA PENGELOLAAN ASET

Pencapaian sasaran presentase realisasi output pengadaan BMN pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Presentase capaian
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%	98.4%	98.4%

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang sesuai DIPA mendapatkan anggaran dengan alokasi belanja modal sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Dipa 2020 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal	25.000.000	24.600.960	98.4%

Alokasi belanja modal dengan anggaran Rp. 25.000.000,- tersebut digunakan untuk pembelian laptop bagi kebutuhan Teknologi Informasi pada kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

Presentase capaian kinerja pengelolaan aset sebesar 98,4%. Dengan demikian pengelolaan aset hampir mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020.

C. REALISASI ANGGARAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

1. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Tangerang mendapatkan total alokasi anggaran Rp. 20.904.421.000,- (*Dua puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

➤ Dipa (01) Badan Urusan Administrasi dengan 2 program yaitu :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 20.320.661.000,-
LKJIP PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2020

- 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Rp. 25.000.000,-
- DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan 1 program yaitu :
- 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 558.760.000,-
Rp. 20.904.421.000,-

A. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Dalam RENSTRA, ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Tangerang.

Anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 20.320.661.000,- (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp. 19.520.822.471 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang didalamnya terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja
DIPA Badan urusan Administrasi (01) Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Belanja Pegawai	16.741.569.000	16.587.054.868	99.08
Belanja Barang	3.554.092.000	2.908.816.643	81.84
Belanja Modal	25.000.000	24.600.960	98.40
Total	20.320.661.000	19.520.472.471	96.06

a. **Belanja Pegawai :**

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai digunakan antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawai dan tunjangan Fungsional PNS. Jumlah belanja pegawai yaitu sebesar Rp 20.320.661.000,- (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp.19.520.822.471 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*). Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2020

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.541.487.000	6.533.622.300	99.88
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88.000	87.060	98.93
3	511121	Belanja Tunj. Suami Istri PNS	440.955.000	440.015.375	99.79
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	112.993.000	112.480.656	99.55
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63.725.000	62.725.000	98.43
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.107.276.000	7.107.075.000	100
7	511125	Belanja Tunj. PPH PNS	1.016.744.000	1.015.867.957	99.91
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	265.366.000	261.146.520	98.41
9	511129	Belanja Uang Makan	1.141.915.000	1.003.215.000	87.85
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51.020.000	50.820.000	99.61
Total Belanja Pegawai			16.741.569.000	16.587.054.868	99.08

b. **Belanja Barang**

Belanja barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada tahun anggaran 2020 anggaran untuk belanja yaitu sebesar Rp. 3.554.092.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp 2.908.816.643 (*Dua Milyar Sembilan Delapan Juta delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2020

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.036.400.000	996.343.442	96.14
2	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	5.000.000	4.194.000	83.88
3	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	84.720.000	84.720.000	100.0
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	294.279.000	164.549.550	55.92
5	522111	Belanja Langganan Listrik	618.300.000	609.747.647	98.62
6	522112	Belanja Langganan Telepon	9.600.000	1.839.484	19.16
7	521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	107.100.000	106.949.900	99.86
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	582.280.000	524.111.300	90.01
9	523121	Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410.404.000	282.518.120	68.84
10	524111	Belanja perjalanan biasa	95.760.000	34.840.000	36.38
11	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	13.105.000	11.800.000	90.04
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	2.700.000	36.00
13	521131	Belanja Operasional Covid	2.500.000	2.256.700	90.27
14	521841	Belanja Barang Persediaan Covid	25.200.000	24.746.500	98.2
15	524119	Belanja Perjalanan Dinas	3.304.000	0	0
16	522141	Beban Sewa	257.040.000	56.700.000	22.06
17	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.600.000	800.000	50
Total Belanja Barang			3.554.092.000	2.908.816.643	81.84

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Untuk tahun anggaran 2020, Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Tabel 27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2020

No	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	523111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	24.600.960	99,80
Total Belanja Modal			25.000.000	24.600.960	99,80

B. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Dalam RENSTRA, ditetapkan program peningkatan manajemen Peradilan Umum yang diimplementasikan ke dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada DIPA (03) Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Tangerang menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 558.760.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Tabel 28. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2020

No	Kode Akun	Uraian	Pagu Rp	Realisasi (Rp)	%
1	521211	Belanja Bahan	188.865.000	163.453.000	86.54
2	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.900.000	126.510.000	89.79
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	166.300.000	166.005.600	99.82
4	522131	Belanja Jasa Konsultan	33.600.000	33.600.000	100
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	26.335.000	18.049.500	68.54
Total Belanja Barang			556.000.000	507.618.100	91.30

C. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

- DIPA (01) Digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :
 1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 2. (005.01.02) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program yaitu(005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 29. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp	Sisa Rp	Capaian %
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	20.320.661.000	19.519.341.972	801.319.028	96.06
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	24.600.960	399.040	99.8
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	558.760.000	508.158.100	50.601.900	90.94

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

➤ Anggaran Badan Urusan Administrasi

Tabel 30. Realisasi PNBP Badan Urusan Administrasi
Tahun Anggaran 2020

Jenis Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425131	Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	45.253.000
Total		45.253.000

➤ Anggaran Badan Peradilan Umum

Tabel 31. Realisasi PNBP Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2020

Jenis Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada panitera badan peradilan	27.150.000
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di bawah tangan	420.000
425233	Pendapatan ongkos perkara	86.770.000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya	219.413.500
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	25.574.000
Total		359.327.500

Indikator kinerja yang termasuk ke dalam program peningkatan manajemen Peradilan Umum dan Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung serta Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, target dalam RKT dan PKT, usulan anggaran, anggaran dalam Dipa dan realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 32. Persentase Realisasi Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 terhadap RKT dan PKT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RKT dan PKT		USULAN ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PRESENTASE REALISASI ANGGARAN
			Detail	Rata-Rata				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pidana Biasa 100% ➤ Pidana Anak 100% ➤ Perdata 100% <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pidana Biasa 77.51% ➤ Pidana Anak 100% ➤ Perdata 79.66 % <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Banding 94.05% ➤ Kasasi 95.87% ➤ PK 98.35% <p>d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi 3.84</p>		86.21%	584.560.000	522.400.000	474.018.100	90.73%

		e. Indeks responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%					
		f. Presentase pelayanan zero complain di PTSP	100%					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Pidana biasa - Pidana Anak - Perdata	100.0% 100.0% 96.08%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.88%	71.53%	584.560.000	522.400.000	474.018.100	90.73%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Pidana Biasa - Pidana Anak - Perdata	42.94% 100% 54.83%					
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	NIHIL	NIHIL				

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	2.760.000	540.000	2.220.000	80.43%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Nihil					
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbankum)	100%					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	10.62%	55.31%	584.400.000	522.400.000	474.018.100	90.73%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Presentase Tenaga Teknis / pegawai yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%					
6.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	Presentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	100%					
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Nilai IKPA DIPA 01 dan 03	100%					
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Presentase Realisasi output pengadaan BMN	100%					

Hal ini menunjukkan, dari target kinerja RKT/PKT secara rata-rata (sebesar 76.58%) dalam program peningkatan manajemen LKJIP PENGADILAN NEGERI TANGERANG TAHUN 2020

peradilan umum dapat terpenuhi oleh anggaran Dipa 03 karena realisasi anggaran sebesar 90.94% sedangkan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dapat dipenuhi oleh anggaran Dipa 01 karena realisasi anggaran sebesar 96.06%.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya penyelesaian perkara pidana, perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur).

Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yaitu pelayanan peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020 merupakan capaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan

peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan internal. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa Pengadilan Negeri Tangerang.

B. HAMBATAN/ MASALAH

1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian/ unit kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.
2. Kondisi gedung kantor yang kurang memadai sehingga Pengadilan Negeri Tangerang belum mampu untuk menjalankan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara maksimal.
3. Optimalisasi penyerapan anggaran khususnya DIPA 03 pada Pengadilan Negeri Tangerang belum sepenuhnya dapat direalisasikan mencapai 100%.
4. Jumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi umum maupun administrasi teknis peradilan.

C. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Tangerang maka diperlukan:

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punish* and *reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan.
5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.
6. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar kantor Pengadilan Negeri Tangerang dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para pencari keadilan.

Akhirnya, semoga LKjIP Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Negeri Tangerang, LKjIP Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI TANGERANG**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	77.51% 100% 79.66%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	94.05% 95.87% 98.35%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3.84%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%
		f. Presentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	100% 100% 96.08%
		b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	6.88%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. 1. Pidana Biasa 2. Pidana Anak 3. Perdata	42.94% 100% 54.83%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Nihil

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Nihil
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10.62%
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase Tenaga Teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	
6.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA Dipa 01	100%
		b. Nilai IKPA Dipa 03	
8.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	a. Presentase realisasi output pengadaan BMN	100%

No. Kegiatan :

Anggaran :

1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 20.320.661.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.	Rp 25.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 558.760.000

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Perdata	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Pidana Biasa	77.51%	80.34%	103.65%
		2. Pidana Anak	100%	82.08%	82.08%
		3. Perdata	79.66%	73.74%	92.56%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1. Banding : -Pidana Biasa	96.68%	96.37%	99.67%
		- Pidana Anak	100%	96.36%	96.36%
		- Perdata	91.33%	94.69%	103.67%
		2. Kasasi : - Pidana Biasa	97.37%	98.30%	100.95%
		- Pidana Anak	100%	100%	100%
		- Perdata	94.32%	99.12%	105.08%
3. PK : - Pidana Biasa	99.65%	99.84%	100.19%		
- Pidana Anak	100%	100%	100%		
- Perdata	97.00%	99.70%	102.78%		
d. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan secara diversi	3.84%	7.14%	185.9%		
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85.30%	89.67%	105.12%		
e. Presentase Pelayanan Zero Complain di PTSP	100%	100%	100%		
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 1					108.74%
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu			
		- Pidana Biasa	100%	100%	100%
		- Pidana Anak	100%	100%	100%
		- Perdata	96.08%	100%	108.6%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6.88%	5.87%	85.31%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.			
		- Pidana Biasa	42.94%	38.69%	90.10%
		- Pidana Anak	100%	66.66%	66.66%
		- Perdata	54.83%	37.89%	69.10%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Nihil	Nihil	Nihil
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 2					81.8%
3.	Terwujudnya system manajemen system informasi yang terintegrasi & menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 3					100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	10.62%	15.91%	149.8%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 4			149.8%		
5.	Meningkatnya Kualitas Sumber	a. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 5			100%		
6.	Meningkatnya hasil Pengawasan kinerja Aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 6			100%		
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	100%	100%	100%
		b. Nilai IKPA DIPA 03	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 7			100%		
8.	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Presentase Realisasi Output Pengadaan BMN	100%	100%	100%
Rata - rata capaian kinerja pada sasaran 8			100%		
Rata-rata keseluruhan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tangerang			104.45%		

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI TANGERANG

TAHUN ANGGARAN : 2020

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi				*Capaian %			
			Triwulan	Triwulan				Triwulan			
			I-IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan									
		1. Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pidana Anak	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
		3. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu									
		1. Pidana Biasa	77.51%	55.75%	72.72%	80.63%	80.34%	71.92%	93.82%	104.02%	103.65%
		2. Pidana Anak	100%	33.33%	65.62%	71.15%	82.08%	33.33%	65.62%	71.15%	82.08%
		3. Perdata	79.66%	42.60%	57.76%	68.17%	73.74%	53.47%	72.5%	85.57%	92.56%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :									
		1. Banding	94.05%	69.68%	97.47%	97.30%	97.33%	74.08%	103.63%	103.45%	103.48%
		2. Kasasi	95.87%	103.2%	98.49%	98.35%	98.67%	103.2%	102.73%	102.58%	102.92%
		3. PK	98.35%	99.92%	99.83%	99.35%	99.79%	101.59%	101.50%	101.45%	101.46%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	3.84%	0%	0%	7.69%	7.14%	0%	0%	200.2%	185.93%

3	Terwujudnya system manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	10.62%	37.7%	17.71%	17.80%	15.91%	354.9%	166.76%	167.9%	149.81%	
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat/ bimtek non teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
7	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	100%	84.34%	89.02%	92.12%	93.62%	84.34%	89.02%	92.12%	93.62%	
		b. Nilai IKPA DIPA 03	100%	82.97%	87.29%	90.47%	92.15%	82.97%	87.29%	90.47%	92.15%	
8	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Presentase Realisasi Output Pengadaan BMN	100%	0%	0%	0%	98.4%	0%	0%	0%	98.4%	

**Laporan Triwulan I
(Januari – Maret)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



**Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id**

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan I Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
Pidana Anak	5	10	100%	50%	50%
Perdata	656	510	100%	77.74%	77.74%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh bagian Kepaniteraan Pidana biasa telah mencapai target sedangkan untuk perkara Perdata hampir mencapai target yakni hanya sebesar 77.74%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	814	1460	77.51%	55.75%	71.92%
Pidana Anak	5	15	100%	33.3%	33.3%
Perdata	510	1197	79.66%	42.60%	53.47%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 71.92%, 33.3% dan 53.47% sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	1292	1854	94.05%	69.68%	74.08%
Kasasi	1311	1324	95.87%	99.01%	103.2%
PK	1323	1324	98.35%	99.92%	101.59%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum memiliki progres yang melewati target yang ditetapkan.

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Anak	-	1	3.84%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi belum mendekati target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara diversi yang diselesaikan pada triwulan I tahun 2020.

e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – Maret 2020 adalah 87.65* sedangkan *target yang ditetapkan adalah 85.30. Sehingga capaian kerjanya adalah 102.75% artinya sudah melebihi target yang ditetapkan.*

f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	4667	4667	100%	100%	100%
Pidana	2050	2050	100%	100%	100%
Hukum	1548	1548	100%	100%	100%
Perdata	2211	2211	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu

Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	698	698	100%	100%	100%
Pidana Anak	10	10	100%	100%	100%
Perdata	288	288	92.08%	100%	108.6%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada triwulan I Tahun 2020, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, 100% dan 108.6%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
13	165	6.88%	7.87%	114.3%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	15	51	42.94%	29.41%	68.49%
Pidana Anak	0	0	100%	0	0
Perdata	36	93	54.83%	38.71%	70.6%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 68.49% dan 70.6%, sedangkan untuk pidana anak realisasinya adalah nihil.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Maret	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
1	1	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo tidak ada realisasi penyelesaian perkara. Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang pada periode triwulan I Tahun 2020.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
221	221	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 100 % atau mencapai target yang ditetapkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

- a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
92	244	10.62%	37.7%	354.9%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) sudah melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 354.9%.

Tangerang, 7 April 2020
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



Yanwitra, SH, MH
NIP. 19620125 198303 1 003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan I Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
6	6	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
6	6	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 100%.

6. Meningkatkan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	-	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 0%. Dikarenakan belum ada Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten sejak bulan Januari sd Maret 2020.

7. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan

- a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	84.34%	84.34%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 84.34%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	82.97%	82.97%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 82.97%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2020)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000	Rp. 0	0%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 0%.

Tangerang, 7 April 2020

Mengetahui,

Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang



H. AHMAD HAKIR, SH, MH
NIP. 196207131987031002

**Laporan Triwulan II
(Januari – Juni)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



**Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id**

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
Pidana anak	10	10	100%	100%	100%
Perdata	656	656	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana dan Perdata dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan..

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	1541	2119	77.51%	72.72%	93.82%
Pidana Anak	21	32	100%	65.62%	65.62%
Perdata	893	1546	79.66%	57.76%	72.5%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata sebesar 93.82%, 65.62% dan 72.5% sudah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	2393	2455	94.05%	97.47%	103.63%
Kasasi	2418	2455	95.87%	98.49%	102.73%
PK	2451	2455	98.35%	99.83%	101.50%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum memiliki progres telah mencapai target yang ditetapkan.

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Perkara	Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana	~	4	3.84%	0%	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi belum mencapai target yang ditetapkan.

e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan **Januari – Juni 2020 adalah 90.30%**. sedangkan *target yang ditetapkan adalah 85.30*. Sehingga capaian kinerjanya adalah 105.86%.

f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	8425	8425	100%	100%	100%
Pidana	3450	3450	100%	100%	100%
Hukum	2572	2572	100%	100%	100%
Perdata	4334	4334	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu

Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada

Triwulan I tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	1267	1267	100%	100%	100%
Pidana Anak	21	21	100%	100%	100%
Perdata	589	589	92.08%	100%	108.6%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada triwulan II Tahun 2020, isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan 108.6%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
18	271	6.88%	6.64%	96.51%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	33	94	42.94%	35.1%	81.74%
Pidana Anak	0	0	100%	0	0
Perdata	59	164	54.83%	35.9%	65.47%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 81.74% dan 65.47%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Juni	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
1	1	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan Pidana.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
281	281	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

- a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
113	638	10.62%	17.71%	166.76%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) sudah melewati target yang ditetapkan yakni sebesar 166.76%.

Tangerang, 9 Juli 2020
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang



Yanwitra, SH, MH
NIP. 19620125 198303 1 003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan II Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
9	9	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
6	6	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 100%.

6. Meningkatkan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	-	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 0%. Dikarenakan belum ada Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten sejak bulan Januari sd Juni 2020.

7. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan

- a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	89.02%	89.02%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 89.02%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	87.29%	87.29%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Maret 2020 sebesar 87.29%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2020)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000	Rp. 0	0%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 0%.

Tangerang, 9 Juli 2020

Mengetahui,

Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang

H. AHMAD HAKIR, SH, MH

NIP. 196207131987031002

**Laporan Triwulan III
(Januari – September)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



**Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id**

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
Pidana Anak	10	10	100%	100%	100%
Perdata	656	656	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana dan Perdata dapat diselesaikan semua oleh bagian Kepaniteraan.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	2170	2691	77.51%	80.63%	104.02%
Pidana Anak	37	52	71.15%	100%	71.15%
Perdata	1502	2203	79.66%	68.17%	85.57%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana biasa sebesar 104.02% sudah melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk persentase perkara perdata dan pidana anak masih hampir memenuhi target yakni sebesar 85.57% dan 71.15%.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	3609	3709	94.05%	97.30%	103.45%
Kasasi	3648	3709	95.87%	98.35%	102.58%
PK	3701	3709	98.35%	99.78%	101.45%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan PK telah mencapai target yang ditetapkan.

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversi

Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversi pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversi

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara pidana anak	Target	Realisasi**	Capaian
1	13	3.84%	7.69%	200.2%

** Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversi telah mencapai target yang ditetapkan.

e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Tangerang periode bulan *Januari – September 2020 adalah 89.43*, sedangkan target yang ditetapkan adalah *85.30*. Sehingga capaian kerjanya adalah *104.84%*.

f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	10110	10110	100%	100%	100%
Pidana	5453	5453	100%	100%	100%
Hukum	4498	4498	100%	100%	100%
Perdata	6829	6829	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu

Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan

III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	2152	2152	100%	100%	100%
Pidana Anak	37	37	100%	100%	100%
Perdata	934	934	92.08%	100%	108.6%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi isi putusan perkara pidana biasa, pidana anak dan perdata yang diterima tepat waktu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan 108.6%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
27	438	6.88%	6.16%	89.53%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	57	133	42.94%	42.85%	99.79%
Pidana Anak	0	0	100%	0	0
Perdata	92	231	54.83%	39.82%	72.62%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa dan perdata capaiannya masing-masing sebesar 99.79% dan 72.62%. untuk capaian presentase perkara pidana anak sebesar nihil.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Des	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
1	1	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo adalah 100% atau telah memenuhi target.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
362	362	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

- a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
149	837	10.62%	17.80%	167.9%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) sudah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 167.9%.

Tangerang, 8 Oktober 2020
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang


Yanwitra, SH, MH
NP 19620125 198303 1 003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan III Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
12	12	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d September 2020 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
9	9	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d September 2020 sebesar 100%.

6. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	~	0%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d September 2020 sebesar 0%. Dikarenakan belum ada Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten sejak bulan Januari sd September 2020.

7. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

- a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan III

tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	92.12%	92.12%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d September 2020 sebesar 92.12%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	90.47%	90.47%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d September 2020 sebesar 90.47%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2020)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000	Rp. 0	0%

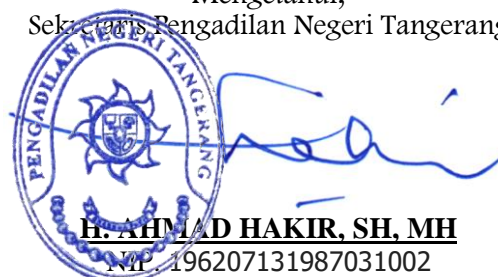
** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d September 2020 sebesar 0%.

Tangerang, 8 Oktober 2020

Mengetahui,

Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang



H. AHMAD HAKIR, SH, MH

NIP. 196207131987031002

**Laporan Triwulan IV
(Januari – Desember)
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**



**Pengadilan Negeri Tangerang
Jln. TMP Taruna No.7 Tangerang, Banten 15118
website: www.pn-tangerang.go.id**

Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis untuk melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Tangerang ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur dengan menggunakan target kinerja pada indikator-indikatornya.

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian IKU sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	778	778	100%	100%	100%
Pidana Anak	10	10	100%	100%	100%
Perdata	656	656	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase sisa perkara yang diselesaikan baik perkara Pidana dan Perdata dapat diselesaikan semua oleh bagian Kapaniteraan.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	2657	3307	77.51%	80.34%	103.65%
Pidana Anak	55	55	100%	100%	100%
Perdata	2053	2784	79.66%	73.74%	92.56%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara pidana dan perdata sebesar 103.65% dan 92.56% sudah melebihi target yang ditetapkan.

c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah putusan perkara	Target	Realisasi**	Capaian
Banding	4638	4765	94.05%	97.33%	103.48%
Kasasi	4702	4765	95.87%	98.67%	102.92%
PK	4755	4765	98.35%	99.79%	101.46%

** Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan PK telah mencapai target yang ditetapkan.

d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversif

Capaian Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversif pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversif

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversif	Jumlah perkara pidana anak	Target	Realisasi**	Capaian
2	28	3.84%	7.14%	185.93%

** Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversif dengan jumlah perkara pidana anak

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara diversif telah mencapai target yang ditetapkan.

e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indeks responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan peradilan periode bulan *Januari – Desember 2020 adalah 89.67 target yang ditetapkan adalah sebesar 85.30%, maka capaian nya adalah sebesar 105.12% (melebihi target).*

f. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Capaian Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Bagian	Jumlah pelayanan yang diterima	Jumlah pelayanan yang diterima tanpa complain	Target	Realisasi**	Capaian
Umum	12.632	12.632	100%	100%	100%
Pidana	6.887	6.887	100%	100%	100%
Hukum	6.358	6.358	100%	100%	100%
Perdata	9.064	9.064	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase Pelayanan Zero Complain di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mencapai target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat waktu

Capaian Persentase isi putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu pada Triwulan

IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Persentase isi putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah putusan	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	3279	3279	100%	100%	100%
Pidana Anak	55	55	100%	100%	100%
Perdata	1246	1246	92.08%	100%	108.6%

** Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi isi putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu mencapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Untuk persentase isi putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu juga mencapai target yakni sebesar 100%.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Target	Realisasi**	Capaian
35	596	6.88%	5.87%	85.31%

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Capaian Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Target	Realisasi**	Capaian
Pidana Biasa	65	168	42.94%	38.69%	90.10%
Pidana Anak	2	3	100%	66.66%	66.66%
Perdata	118	351	54.83%	37.87%	69.10%

** Perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu untuk pidana biasa dan perdata

capaiannya masing-masing sebesar 107.47% dan 67.42%, sedangkan untuk pidana anak sebesar 66.66%.

- d. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Capaian persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Persentase Putusan Perkara Yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Periode	Jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website	Jumlah perkara tipikor yang diputus	Target	Realisasi**	Capaian
Jan - Des	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website terhadap jumlah perkara tipikor yang diputus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus sebesar nihil sebab Pengadilan Negeri Tangerang tidak ada perkara Tipikor.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Capaian Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Persentase Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo	Target	Realisasi**	Capaian
3	3	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase perkara prodeo yang diselesaikan oleh bagian Kepaniteraan Pidana adalah 100%.

- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Persentase Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan	Target	Realisasi**	Capaian
Perdata	Nihil	Nihil	100%	Nihil	Nihil

** Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Target	Realisasi**	Capaian
470	470	100%	100%	100%

** Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum telah mencapai target yakni sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (eksekusi)

- a. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Capaian Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	Target	Realisasi**	Capaian
158	993	10.62%	15.91%	149.81%

** Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi) telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 149.81%.

Tangerang, 5 Januari 2021
Mengetahui,
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang


Yanwitra, SH, MH
NIP. 19620125 198303 1 003

II. Bagian Kesekretariatan

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 disajikan dalam uraian pencapaian sebagai berikut :

- a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Capaian persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
22	22	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 100%.

- b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis pada Triwulan III tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis

Jumlah Peserta (orang)	Peserta Lulus Diklat/Bimtek (Orang)	Target	Realisasi	Capaian
9	9	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 100%.

6. Meningkatkan Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan

- a. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti pada Triwulan II tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Persentase temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Laporan Hasil Pengawas Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Laporan Hakim Pengawas Daerah yang ditindaklanjuti bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 100%. Dikarenakan ada Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banten pada bulan Januari s.d Desember 2020.

7. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan

- a. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 01 pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Persentase Nilai IKPA Dipa 01

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	93.62%	93.62%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 93.62%.

b. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03

Capaian persentase Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Dipa 03 pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 18. Persentase Nilai IKPA Dipa 03

Uraian	Target	Realisasi	Presentase Capaian
Nilai IKPA Dipa 01	100%	92.15%	92.15%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase nilai IKPA Dipa 01 bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 92.15%.

8. Meningkatnya Pengelolaan Aset

a. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Capaian persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) pada Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 19. Persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN)

Uraian	Target (DIPA 2020)	Realisasi	Presentase Capaian
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000	Rp. 24.600.960	98.4%

** Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/direalisasikan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi output pengadaan Barang Milik Negara (BMN) bulan Januari s.d Desember 2020 sebesar 98.4%.

Tangerang, 5 Januari 2021
Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang



H. AHMAD HAKIR, SH, MH
NIP. 196207131987031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : -Perdata -Pidana Biasa - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana Biasa - Pidana Anak 	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses		$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan	

		secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.		Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

VISI : Mendukung terwujudnya pengadilan negeri Tangerang yang Agung

MISI: 1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri Tangerang

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri Tangerang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri Tangerang

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	93%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000
					- Pidana Biasa	100	100	100	100	100										
					- Pidana Anak	100	100	100	100	100										
					- Perdata	100	100	100	100	100										
					b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu															
					- Pidana Biasa	77,51	82,49	79,79	76,78	73,67										
					- Pidana Anak	100	100	100	100	100										
					- Perdata	79,66	78,13	77,34	76,84	76,43										
					c) Persentase perkara pidana dan perdata yang tidak mengajukan upaya hukum															
					- Banding	94,05	91,87	97,97	98,17	98,27										
					- Kasasi	96,01	97,24	97,34	97,44	97,54										
					- PK	98,35	99,11	99,21	99,31	99,41										
					d) Persentase Perkara pidana Anak yang diselesaikan Dengan Diversi	3,84	7,14	7,24	7,34	7,44										

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
				e) Persentase Index responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan peradilan	85.30	86.12	86.33	87.20	87.63	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000	
				f) Persentase Pelayanan Zero Complain Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu								
				a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	98.69	104.3	104.5	105	105.3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000	
				b. Persentase berkas perkara yang diselesaikan Melalui mediasi	6.88	5.7	7.96	8.14	8.92	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000	
				c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	79.62	38.29	44.15	44.90	45.26	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	1000	PKR	522.400.000	300.960.000	677.900.000	687.900.000	732.000.000	
				d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	2	Unit	25.000.000	265.000.000	248.500.000	376.750.000	285.600.000	

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (%)	Sasaran		Target (%)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	3	PKR	2.760.000	2.760.000	2.580.000	3.156.000	3.980.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan		100	100	100	100	100												
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	336	OJ	33.600.000	33.600.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai IKPA DIPA 01	98	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Presentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis	26	Org	22	30	30	30	30
					Presentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek teknis			9	15	15	15	15
				Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	Presentase temuan LHP daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur pengadilan	1	LHP Daerah	1	1	2	2	2
		Meningkatnya pengelolaan keuangan	Nilai IKPA DIPA 01			100	94	95	96	97	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah layanan perkantoran	1	layanan	98.10	99.00	99.20	99.70	100.00
				Nilai IKPA DIPA 03			100	94	95	96	97	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA			97.35	98.77	99.30	99.65	100.00
			Meningkatnya pengelolaan aset	Presentase realisasi output pengadaan BMN	100	100	100	100	100	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	Jumlah BMN			25.000.000	265.000.000	248.500.000	376.750.000	285.600.000	



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : W29.U4 / 89 /KP.10.10/01/2021

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 20019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020
Tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Mengingat : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan
ini untuk melaksanakan tugas sebagai tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2020 ;

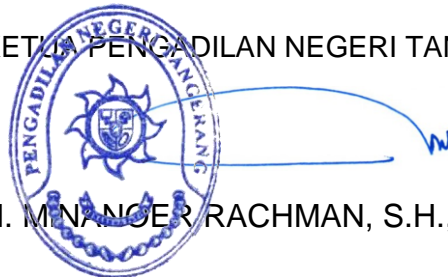
KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjalankan tugas
sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



H. MINANOE RACHMAN, S.H., M.H.

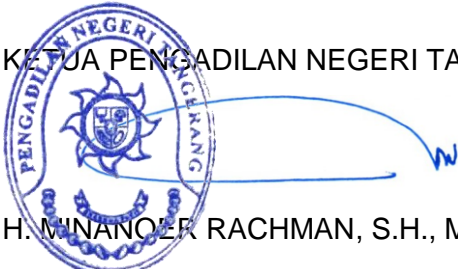
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor W29.U4/89/KP.10.10/1/2021
Tanggal 21 Januari 2021

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. MINANOER RACHMAN, S.H, M.H	Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Pelindung / Penasehat
2	SUTARJO, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang	Penanggung Jawab
3	RINI SUMARNINGSIH, S.H,M.M	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang	Ketua
4	YANWITRA, S.H, M.H	Panitera Pengadilan Negeri Tangerang	Wakil Ketua
5	DESSY HERLIANI, S.Sos	Kepala Bagian Umum	Koordinator Utama
6	DENHAR, S.H, M.H	Ka. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
7	MARTHIN TURNIP, S.H, M.H	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Perkara
8	AGUS SOFYAN, S.H	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	MUHAMMAD TAUFIK, S.H, M.H	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	BAYU FITRIAS L BHASKARA, S.T, M.H	Ka. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota
11	H RACHMAT BUDIYANTO	Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12	PRISKA RUFINA S, S.E	Staff Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
13	ADHI FIRZIA MIHRAM	Staff Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H